

# PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMK PANCASILA 1 WONOGIRI

**Ananda Setiawan**

Universitas Sebelas Maret

[Anandasetiawan.blogku@gmail.com](mailto:Anandasetiawan.blogku@gmail.com)

## ABSTRAK

*Pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengelolaan yang baik menjadi syarat utama dalam kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 48 bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparan dan prinsip akuntabilitas Publik, namun perlu ada penekanan pada prinsip efektifitas. Tujuan utama mengelola sekolah yaitu sekolah dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui rencana pengelolaan pembiayaan dan mengetahui realiasi anggaran dalam pengelolaan keuangan di SMK Pancasila 1 Wonogiri dengan cara membandingkan fakta dilapangan dengan kajian secara teoritis dan empiris dari referensi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMK Pancasila 1 Wonogiri telah melakukan pengelolaan anggaran-dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan yang akuntabel, efektif dan efisien, namun hal yang perlu ditingkatkan adalah transparansi kepada stake holder .*

**Kata Kunci:** *Lembaga Pendidikan, Pengelolaan Keuangan*

## ABSTRACT

*Financial management of educational institutions is very important part in providing education in schools. Good management of the main requirements in the smooth delivery of education. Based on the principles of financial management education contained in Act No. 20 of 2003 article 48 that education funds based on the principles of equity, principles of efficiency, principles of transparency and principles of public accountability, but there needs to be an emphasis on the principles of effectiveness. The main purpose of the school that the school can manage to produce quality output in order to meet the needs of the community as service users. This type of research is the study of research literature to find references relevant theory to the study. The purpose of this study was to determine the financial management plan and determine the realization of the budget in the financial management in SMK Pancasila 1 Wonogiri by comparing the fact the field with theoretical and empirical study of relevant references. These results indicate that the SMK Pancasila 1 Wonogiri was managing a budget is good it can be seen from the management accountable, effective and efficient, but it needs to be improved is the transparency to stakeholders.*

**Keywords:** *educational institution, Financial Management*

## I. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan Sumber Daya Manusia. Tidak ada satu halpun yang dilakukan oleh manusia yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Salah satu masalah fundamental di dalam sistem pendidikan nasional adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan sekolah yang terstandarisasi. Oleh karena itu, pembenahan manajemen keuangan sekolah harus dimulai dengan cara menyusun teknik-teknik pengelolaan keuangan sekolah yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku

secara umum. Pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi pelaksanaan dana, baik biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti- bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Tujuan utama mengelola sekolah adalah bagaimana sekolah dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja yang terampil, terdidik dan profesional, serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah tentunya membutuhkan biaya yang memadai dengan besarnya lebih banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah menengah umum lainnya.

Thorogood (1982: 328) dalam Arwizet (2014:141) mengungkapkan bahwa pendidikan kejuruan memiliki tujuan untuk: 1) memberikan bekal keterampilan individual dan keterampilan yang laku di masyarakat, sehingga peserta didik secara ekonomis dapat menopang kehidupannya, 2) membantu peserta didik memperoleh atau mempertahankan pekerjaan dengan jalan memberikan bekal keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diinginkannya, 3) mendorong produktivitas ekonomi secara regional maupun nasional, 4) mendorong terjadinya tenaga terlatih untuk menopang perkembangan ekonomi dan industri, 5) mendorong dan meningkatkan kualitas masyarakat.

Perencanaan memiliki peran penting dalam manajemen keuangan sekolah, sehingga minimnya perencanaan akan berpengaruh pada keberhasilan yang diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Argyropoulou, Eleftheria (2009: 117) bahwa *“lack of planning implies possible misuse of the allocated funds as well as confusion and lack of organizing the head’s workload properly”*. Berdasarkan hasil observasi di SMK Pancasila 1 Wonogiri Pemasukan anggaran SMK Pancasila 1 Wonogiri berasal dari Saldo tahun pelajaran lalu, SPP, dana Praktik, dana ulangan umum, Ujian Nasional, prakerin, dana Pembangunan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Rencana Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Pancasila 1 Wonogiri?
2. Bagaimana realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan di SMK Pancasila 1 Wonogiri?

#### **c. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Rencana Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Pancasila 1 Wonogiri.
2. Untuk mengetahui realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan di SMK Pancasila 1 Wonogiri.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literature dengan mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Referensi teori diperoleh guna menjadikan fondasi dasar dan alat utama bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

### **b. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di SMK Pancasila 1 Wonogiri Jawa Tengah dan penelitian dilakukan mulai tanggal 21 September 2016 – 14 Desember 2016.

### **c. Metode Pengumpulan data**

1. Dokumentasi  
Menurut Moleong (2016: 216) “Dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun film”. Dokumentasi yang digunakan peneliti yakni dokumen sekolah berupa RAPBS dan foto sekolah dan Undang-undang Republik Indonesia.
2. Studi literatur  
Peneliti menggunakan literatur yang relevan dari jurnal internasional dan buku.
3. Observasi

Menurut Marshall (Sugiyono, 2016: 223) *“through observation, the researcher learns about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Peneliti mengobservasi pengawas keuangan sekolah mengenai manajemen pengelolaan keuangan di SMK Pancasila 1 Wongiri.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. KAJIAN PUSTAKA

##### 1. Hakekat Pengelolaan Biaya Pendidikan

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan disekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional (UU RI No.2 Th. 1998) bahwa Pembiayaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 meliputi: Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi. Dari beberapa pengertian pembiayaan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan uang, sedangkan keuangan dalam pendidikan yaitu segala urusan aktivitas kegiatan pendidikan yang melibatkan uang.

##### 2. Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Wong, Evia O.W (2003: 243) menjelaskan bahwa sekolah dengan sistem manajemen yang baik, harus memiliki hal-hal berikut:

- 1. a clear vision, underpinned by a set of values which will guide its policies, procedures and practices*
- 2. a strong focus on the student outcomes to improve both curriculum and teaching practice, and*
- 3. a strong alliance of stakeholders, including parents, teachers, and community members, working in partnership to develop the potential of each and every student to the fullest extent.*

Dari kutipan-kutipan diatas tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam proses perencanaan diawali dengan mengidentifikasi keadaan, melihat dan menimbang potensi yang tersedia dan memahami kebutuhan, keadaan dan masalah yang akan dihadapi agar perencanaan kompeten dan relevan untuk dilaksanakan agar tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

##### 3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

##### 4. Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan menurut Suryana (2008) adalah:

- a. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.
- b. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada.

- c. Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain.
- d. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban anggaran bukan hanya melaporkan pertanggungjawaban keuangan. Namun hasil pelaporan anggaran juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah yang diemban serta sesuai dengan realita pengeluaran anggaran yang sebenarnya.

#### 5. Karakteristik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk jalur pendidikan formal yang diterapkan di Indonesia. Finch dan Crunkilton (1979: 5) mengartikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk mencari penghasilan bagi kehidupan atau pendidikan untuk bekerja (*education for work*). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Evans dan Edwin (Arwizet, 2014) bahwa “pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan individu pada suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif yang dapat langsung bekerja di bidangnya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip investasi SDM (human capital investment).

#### b. Pembahasan

##### 1. Pembiayaan SMK Pancasila 1 Wonogiri

SMK Pancasila 1 Wonogiri merupakan Sekolah yang mandiri dan professional dalam mengelola pembiayaan sekolah. Pembiayaan SMK 1 Wonogiri berasal dari beberapa sumber antara lain dari BOS dan uang SPP siswa yang dibayar setiap bulannya. Jadi sekolah sangat bergantung dari sumber-sumber pendapatan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembiayaan sekolah pihak sekolah bekerjasama dengan Bagian keuangan dalam pelayanan pembayaran SPP, dan para peserta didik dapat langsung membayar melalui petugas yang tersedia disekolah.

Pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Pancasila 1 Wonogiri meliputi :

- a. Saldo tahun pelajaran lalu  
Saldo tahun lalu yang berlebih merupakan bagian dari pemasukan tahun yang akan datang. Menurut laporan rencana pemasukan dan pengeluaran SMK Pancasila 1 Wonogiri pada tahun ajaran 2014/2015 terdapat saldo yang berlebih sebesar Rp. 32.784.295 yang termasuk kedalam pemasukan keuangan tahun 2015/2016. Sedangkan pada anggaran 2015/2016 yang berakhir bulan juli 2016, terdapat sisa saldo sebesar Rp. 31.152.483 yang kemudaian akan digunakan sebagai sumber penerimaan tahun anggaran berikutnya. Setiap kelebihan saldo akan masuk kelaporan penerimaan anggaran sekolah yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan operasional sekolah.
- b. SPP  
Pemasukan yang paling besar dari masyarakat adalah uang SPP yang rutin dibayarkan oleh para siswa setiap bulannya yang mana dana tersebut digunakan untuk proses belajar mengajar. Total penerimaan SPP dari 1521 siswa yang belajar di SMK Pancasila Wonogiri pada tahun ajaran 2015/2016 sebesar Rp. 2.440.462.500. Menurut keterangan bendahara, realisasi yang didapat dari rencana penerimaan SPP selalu berlebih karena rencana penerimaan dari SPP lebih kecil dari total yang seharusnya didapatkan. SPP yang harus dibayar siswa perbulan sebesar Rp. 150.000 yang dapat dibayarkan langsung ke bagian administrasi sekolah.
- c. Dana Praktik  
SMK Pancasila 1 Wonogiri merupakan sekolah yang mengutamakan praktek lapangan dalam pembelajarannya. Uang praktek yang diperoleh sekolah sebesar Rp. 324.200.000 pertahun yang diperoleh dari pembayaran siswa.

- d. Ulangan Umum  
Pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat beberapa ulangan yakni ulangan tengah semester gasal, Ulangan Semester, dan Ulangan Tengah semester genap. Total penerimaan sekolah dari ulangan umum sebesar 279.615.000 yang kemudian dialokasikan untuk operasional sekolah.
- e. Ujian Nasional  
Untuk pelaksanaan ujian nasional, sekolah mendapat penerimaan sebesar 301.875.000 pada tahun ajaran 2015/2016.
- f. Prakerin  
Untuk penerimaan prakerin, sekolah memperoleh penerimaan sebesar 63.875.000. Menurut bendahara, penerimaan tersebut tidak akan jauh berbeda untuk setiap tahunnya.
- g. Dana Pembangunan  
Dana perolehan dari pendanaan pembangunan bukan hanya berasal dari siswa saja melainkan dari biaya raker dari YPP yaitu sebesar Rp. 1.012.615.000. dana tersebut rutin didapat setiap tahunnya oleh SMK Pancasila 1 Wonogiri.
- h. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
Penerimaan Bantuan dari Pemerintah yaitu BOS juga merupakan dana terbesar SMK Pancasila 1 Wonogiri setelah penerimaan dari SPP. Besaran penerimaan sekolah dari BOS yaitu Rp. 1.481.000.000.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik sangat mempengaruhi penggunaan keuangan sekolah yang efektif dan efisien untuk membiayai seluruh kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan yang sekolah yang di inginkan, maka diperlukan kemampuan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan yang memadai tentunya sehingga pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan sesuai acuan efektif dan efisiensi.

## 2. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SMK Pancasila 1 Wonogiri

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan sekolah. SMK Pancasila 1 Wonogiri termasuk sekolah yang baik dalam perencanaan pengelolaan anggaran sekolah, yakni mencatat seluruh rencana pemasukan dan menganggarkan seluruh pembiayaan yang harus dikeluarkan sekolah dalam satu tahun. Berikut perencanaan sekolah SMK Pancasila 1 Wonogiri yang dijelaskan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1. RAPBS SMK Pancasila 1 Wonogiri 2016/2017**

Penerimaan		Pengeluaran	
Saldo tahun pelajaran lalu	31,152,483	Kegiatan Belajar Mengajar	640,169,900
SPP	2,440,462,500	Sarana dan prasarana	46,143,100
Dana Praktik	324,200,000	Administrasi Kantor	
Ulangan Umum	279,615,000	Honorarium dan Kesejahteraan	2,295,700,100
Ujian Nasional	301,875,000	Pemerataan Pendidikan	61,570,300
Prakerin	63,875,000	Supervisi Edukasi	24,655,000
Dana Pengembangan	1,012,615,000	Iuran YPP	127,000,000
BOS	1,481,000,000	Lain-lain	356,353,461
		Pembangunan	902,203,122
		BOS	1,481,000,000.00
Jumlah	5,934,794,983	Jumlah	5,934,794,983

*Sumber: SMK Pancasila 1 Wonogiri*

Dengan adanya rencana anggaran yang baik, maka akan meminimalisasi risiko defisit anggaran sekolah dalam pengoperasionalannya. Sejalan dengan hal tersebut, Morelus (Geressu, 2014:48) *“also suggested that where there is wide gap between planned goals and actual performance in most Government establishment of*

*developing countries, it is due to the failure of the financial administrator to perceive the vital aspect of the budget as a bridge between the plan and the action*". Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa rencana yang baik akan meminimalisasi risiko dan persentase ketercapaian tujuan yang diinginkan akan lebih besar dibandingkan dengan perencanaan finansial yang tidak direncanakan dengan matang. Fasilitas yang dimiliki sekolah juga sudah lengkap dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, hal tersebut dapat meningkatkan produktifitas sekolah, hal tersebut sejalan dengan Park, Chung and Rhee (2011:461) *"School facilities provide the physical and social environments to enable students and teachers to interact on a daily basis, for substantial amounts of time, for the purposes of learning and academic development"*.

Untuk melihat pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik, sekolah harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sejalan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang pengelolaan dana pendidikan, kemudian diperkuat oleh pernyataan Mardiasmo (2003) yang mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berikut hasil analisis berdasarkan fenomena yang terjadi di SMK Pancasila 1 Wonogiri :

a. Transparansi

SMK Pancasila 1 Wonogiri melakukan pertemuan kepada ketua komite sebagai bentuk transparansi lembaga pendidikan, namun pertemuan tersebut sangat jarang. Bekerjasama dengan orang tua siswa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat disarankan. Hal tersebut juga didukung pada pernyataan Koross, Ngware and Sang (2009:71) *"parental involvement is likely to increase transparency and accountability in the management of school projects"*. Pelaporan juga dilakukan pengelola keuangan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten serta kepada Yayasan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran.

b. Akuntabilitas

Crouch and Winkler (2008:11) *"the long political and often physical distance between parents and policymakers and the equally long distance from policymakers to the schools translates into very weak accountability by schools to parents"*. Sekolah yang dianggap memiliki akuntabilitas dalam melaporkan pertanggungjawaban laporan keuangan sekolah, berdasarkan pengamatan SMK Pancasila 1 Wonogiri melakukan beberapa hal dalam pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan kepada pihak yayasan yaitu antara lain adalah:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bagian keuangan harus membuat laporan keuangan sekolah kepada yayasan untuk dicocokkan dengan RAPBS. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan anggaran keuangan setiap bagian yang telah dipergunakan selama satu tahun.
2. Laporan pembiayaan pendidikan di SMK Pancasila 1 Wonogiri, meliputi pembiayaan keluar dilampiri dengan bukti atau bon, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana.
3. Semua pembiayaan pendidikan yang di SMK Pancasila 1 Wonogiri dicatat dalam buku besar keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran sekolah untuk dijadikan dokumentasi sekolah dan sebagai acuan untuk pembiayaan sekolah dimasa yang akan datang.
4. Setiap pengeluaran untuk pembiayaan pendidikan harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua yayasan SMK Pancasila 1 Wonogiri.

5. Penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah harus balance jumlahnya. Sehingga saldo yang tersisa dapat diketahui dan kemudian dapat dialokasikan pada penerimaan anggaran sekolah pada tahun selanjutnya.
  6. Laporan juga diberikan kepada perwakilan komite sekolah, walaupun hanya dilakukan beberapa kali.
- c. Efektivitas dan Efisiensi

Dalam mengelola keuangan organisasi yang baik, harus memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran. Penganggaran yang baik adalah penganggaran yang penyerapan dana yang dipersiapkan sesuai dengan anggaran diawal. Penyerapan anggaran yang sesuai dengan alokasi perencanaan harus dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan harus diatur dengan baik. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Mestry and Ntseto (Geressu, 2014:48) "*the administration of a school's finances is an integral part of effective school administration and should be governed by clear direction*".

Berdasarkan hal tersebut, SMK Pancasila 1 Wonogiri telah menjalankan prinsip efektivitas penganggaran, dapat dilihat dari penyerapan anggaran tahun 2015/2016 yang hampir 100 % penggunaan anggarannya yang tercapai. Hal tersebut juga dapat dikatakan efisien karena SMK Pancasila 1 Wonogiri pada tahun terakhir mengalami surplus anggaran yang kemudian dana tersebut dapat dialokasikan pada penerimaan anggaran tahun selanjutnya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari temuan-temuan informasi dari literatur dan informasi dari SMK Pancasila 1 Wonogiri. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Untuk mengetahui pengelolaan anggaran sekolah sudah baik atau belum dapat dilihat dari kemampuan pengelola memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yakni transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas penganggarannya. Berdasarkan kajian literatur dan keadaan yang terjadi di SMK Pancasila 1 Wonogiri mengenai pengelolaan anggaran sekolah ditemukan bahwa pengelolaan anggaran sudah baik, yang dapat dilihat dari pengelolaan yang sudah akuntabel, efisien dan efektif, namun untuk transparansi masih perlu ditingkatkan lagi.

SMK Pancasila 1 Wonogiri melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kualitas pelaporan anggaran sekolah dengan cara mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran anggaran dengan menggunakan bukti transaksi. Hal tersebut merupakan kegiatan yang dapat membuat profesionalitas sekolah lebih dapat diakui oleh *stakeholder*.

Kemudian saran yang dapat penulis berikan melalui tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Ketua Yayasan Pendidikan Pancasila Pusat Surakarta Cabang Wonogiri yaitu bapak Drs.Sakiran dan Ketua komite dalam hal ini bapak Simin Karsamto, B.A. rutin melakukan pertemuan minimal triwulan sekali, untuk mengecek laporan keuangan. Hal tersebut untuk meningkatkan transparansi laporan anggaran dan kemudian melihat realisasi penerimaan Bantuan Operasional Siswa yang didapat setiap triwulan.
- b. Kepala Sekolah sebagai komando tertinggi di SMK Pancasila 1 Wonogiri hendaknya melakukan pertemuan kepada stakeholder termasuk orang tua siswa untuk mendapatkan saran perbaikan sekolah, sehingga pengalokasian pengeluaran sekolah dapat direncanakan lebih efektif dan efisien sesuai dengan yang dibutuhkan.
- c. Bagi Manajemen penerimaan dan pengeluaran keuangan SMK Pancasila 1 Wonogiri harus lebih cermat lagi mengidentifikasi harga dipasar yang kemudian di buat perencanaan pengeluaran melebihi harga pasar untuk menghindari defisit penganggaran.
- d. Sebaiknya dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) melibatkan guru yang kualifikasinya pendidikannya sudah S1 dan pegawai sekolah serta

siswa untuk mengetahui kebutuhan yang secara langsung berpengaruh dalam kegiatan disekolah.

- e. Untuk pengelola keuangan SMK Pancasila 1 Wonogiri agar dapat mempertahankan usaha transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penganggaran yang telah dibuat selama ini yang sudah tergolong baik.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. SMK Pancasila 1 Wonogiri yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan penulis.
2. Dr. Susilaningih, M.Buss yang secara tidak langsung memberikan semangat menulis.
3. Rekan penulis yang telah memberikan masukan dalam membuat tulisan ini.
4. Keluarga Penulis yang masih memberikan dukungan kepada penulis sampai sekarang.

### **REFERENSI**

- Argyropoulou, E. (2009). Financial Management in Greek State Schools. *ISEA*, 37 (2). 111-124.
- Arwizet. K. (2014). "Pendidikan Kejuruan dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Kualitas Human Capital". *Jurnal APTEKINDO ke 7.FPTK Universitas Pendidikan Indonesia*. ISBN: 978-602-72004-0-1
- Crouch, L & Winkler, D. (2008). *Governance, Management and Financing of Education for All: Basic Frameworks and Case Studies*. 2009/ED/EFA/MRT/PI/04
- Finch, Curtiz R & Crunkilton, John. (1993). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*. Boston.
- Geressu, B. S. (2014). *Management of Finance with Reference to Selected Secondary School of Oromia Region, Ethiopia*. Pratibimba. Vol. 14, Iss 1, pp. 47 -52
- Koross, P.K, Ngware, M. W., & Sang, A. K. (2009). Principals' and students' perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in Kenya. *Quality Assurance in Education*. Vol. 17 Iss 1 pp. 61 – 78
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Park, J.C., Chung, M.H. and Rhee, E.K. (2011). "Field survey on the indoor environment of elementary schools for planning of environment friendly school facilities", *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* , Vol. 10 No. 2, pp. 461-468.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta
- Suryana, D. (2008). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1998
- Wong, E.O.W (2003). Leadership Style For School-Based Management in Hong Kong. *International Journal of Educational Management*, 17 (6). 243-247.